

# RESISTENSI PENOBATAN PUTRI MAHKOTA UNTUK KESULTANAN YOGYAKARTA

Ulya Fuhaidah

IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
[ulyafuhaidah@yahoo.com](mailto:ulyafuhaidah@yahoo.com)

## Abstract

*Sultanate of Yogyakarta, which became one of the special region is undergoing tumultuous internal politics of the ruling. because the king did not have sons as successor to power. King the title of Sultan HB X has five children, all of whom are women. As is known to the heir to the throne outlined in Yogyakarta sultanate was never headed by a queen. Since the establishment of this sultanate until now only ruled by the king, which means a man. So when the Sultan HB X announced his throne heir who falls on his eldest daughter, an immediate reaction resistance even internally and externally. To that end, this article would like to examine some aspects of the Sultanate of Yogyakarta and resistance of women's political leadership in the empire by using an Islamic perspective.*

## Abstrak

Kesultanan Yogyakarta, menjadi salah satu kawasan khusus dalam keputusan aturan politik internal kesultanan Kraton. Karena raja tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus kekuasaan. Raja Sultan HB X memiliki lima anak, semuanya adalah perempuan. sebagaimana dipahami bersama bahwa Pewaris Tahta di Kasultanan Yogyakarta tidak pernah dipimpin oleh seorang ratu. Mulai sejak berdirinya kesultanan ini sampai sekarang hanya diperintah oleh raja, yakni seorang pria. Jadi, ketika Sultan HB X mengumumkan pewaris tahtanya yang jatuh pada putri sulungnya, maka terjadi resistansi bahkan secara internal dan eksternal. Atas dasar itulah, artikel ini ingin menganalisis beberapa aspek dari Kesultanan Yogyakarta dan ketahanan kepemimpinan politik perempuan di kerajaan dengan menggunakan perspektif Islam.

**Kata-kata Kunci:** Kesultanan Yogyakarta, resistansi, kepemimpinan politik perempuan

## Pendahuluan

Kesultanan Yogyakarta berdiri sejak dicetuskannya perjanjian Gianti<sup>1</sup> yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua wilayah kekuasaan, yakni wilayah timur menjadi bagian Kesultanan Surakarta sementara wilayah barat menjadi milik Kesultanan Yogyakarta.<sup>2</sup> Eksistensi kedua kesultanan ini masih berlangsung hingga saat ini. Kesultanan Yogyakarta bahkan ditetapkan sebagai daerah yang memiliki status istimewa dalam pemerintahan Indonesia.

Kesultanan Yogyakarta yang menjadi salah satu daerah istimewa ini sedang mengalami kisruh politik internal lantaran raja yang berkuasa tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus kekuasaan. Rajanya yang bergelar Sultan Hamengku Buwono X memiliki lima

orang anak yang semuanya adalah perempuan. Sebagaimana diketahui pewaris tahta yang digariskan di kesultanan Yogyakarta tidak pernah dipimpin oleh ratu atau seorang raja perempuan. Sejak berdirinya kesultanan ini sampai sekarang hanya diperintah oleh raja yang artinya seorang laki-laki. Maka ketika Sultan Hamengku Buwono X mengumumkan calon pewaris tahtanya yang jatuh pada anak perempuannya yang tertua, langsung mendapat reaksi bahkan resistensi secara internal maupun eksternal. Padahal jika mengikuti era modern, kepemimpinan perempuan seharusnya tidak perlu menjadi polemik lagi di era kesetaraan gender. Untuk itu, tulisan ini ingin mengkaji beberapa aspek tentang Kesultanan Yogyakarta dan resistensi kepemimpinan politik perempuan di kesultanan itu dengan menggunakan perspektif Islam tentang kepemimpinan politik perempuan.

## Historis Kesultanan Yogyakarta

Catatan awal tentang sejarah berdirinya kesultanan Yogyakarta sering dinisbatkan kepada sosok Pangeran Mangkubumi yang bernama asli

<sup>1</sup> Dikenal dengan perjanjian Gianti karena penandatanganan kesepakatan perjanjian dilakukan di sebuah desa bernama Gianti yang berada di wilayah Karanganyar. Lihat Purwadi. *Babad Gianti: Sejarah Pembagian Kerajaan Jawa* (Yogyakarta: Media Abadi, 2008), 12.

<sup>2</sup> Sabdacarakatama. *Sejarah Keraton Yogyakarta* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 16.

Raden Mas Sujono.<sup>3</sup> Namanya mulai diperhitungkan dalam politik lokal saat itu ketika ia berhasil menumpas pemberontakan di wilayah Sukawati yang dicituskan oleh Raden Mas Said. Atas keberhasilannya ini Pangeran Mangkubumidijanjikan mendapatkan hadiah tanah di wilayah Sukawati oleh Sunan Mataram, Kanjeng Susuhunan Pakubuwono II. Namun sayangnya sang Sunan ingkar kepada janjinya sendiri sehingga Pangeran Mangkubumi terus melakukan perlawanan terhadap Sunan Pakubuwono II dan III yang berlangsung hingga 9 tahun lamanya terhitung sejak 1746.<sup>4</sup> Pemberontakan Pangeran ini sangat sulit dipadamkan, sehingga ditempuhlah sebuah perundingan antara Pangeran, Sunan Pakubuwono, dan VOC yang memiliki hubungan baik dengan Sunan.

Penandatanganan perjanjian ini dikenal dengan Perundingan Gianti 13 februari 1755 antara Pangeran Mangkubumi dan Gubernur Jenderal VOC Jacob Mossel. Isi perjanjian adalah pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua wilayah kekuasaan. Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi sultan untuk setengah daerah Mataram dengan gelar Sultan Hamengku Buwono I dan daerah lainnya menjadi milik Sunan Paku Buwono III dengan sebutan Kesunanan Surakarta. Sementara daerah pesisir tetap dikuasai oleh VOC.<sup>5</sup>

Akhirnya Pangeran Mangkubumi memiliki wilayah kekuasaan sendiri. Batas wilayah yang membedakan dua wilayah ini adalah Sungai Opak yang berada di sebelah barat Candi Prambanan. Wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan luas 87.050 cacah yang meliputi daerah Mataram asli, Kedu Bagelen, Banjarnegara, sebagian Pajang, sebagian Pacitan, Madiun, Grobogan, dan Mojokerto.<sup>6</sup>

Pendirian pusat kesultanan pada awalnya di wilayah Pesanggrahan Ambar Ketawang, namun sejak 3 Syura tahun wawu 1681 atau bertepatan dengan 9 Oktober 1755 Pangeran Mangkubumi

menempati keraton kesultanan yang ditempati hingga saat ini.<sup>7</sup> Ia naik tahta sebagai raja yang pertama dengan gelar *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun Kanjeng Sulthan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Khalifatullah Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Inkgang Jumeneng Ing Negari Yogyakarta*.<sup>8</sup> Berikut ini adalah silsilah urutan penguasa di Kesultanan Yogyakarta:

1. Sri Sultan Hamengku Buwono I Pangeran Mangkubumi (1755-1792)
2. Sri Sultan Hamengku Buwono II Sultan Sepuh (1792-1812)
3. Sri Sultan Hamengku Buwono III Sultan Raja (1812-1814)
4. Sri Sultan Hamengku Buwono IV Sultan Seda ing Pesiwar (1814-1823)
5. Sri Sultan Hamengku Buwono V (1823-1855)
6. Sri Sultan Hamengku Buwono VI (1855-1877)
7. Sri Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1921)
8. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939)
9. Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1940-1988)
10. Sri Sultan Hamengku Buwono X (1989-sekarang)

Dari silsilah raja-raja di atas, dapat dilihat bahwa semua raja di Kesultanan Yogyakarta adalah laki-laki. Sultan Hamengku Buwono merupakan *Sampeyan Dalem Inkgang kaping Sedoso*. Artinya bahwa sultan ini adalah pemegang tahta yang ke sepuluh. Sementara gelar yang disandangnya sarat maknanya arti pergeseran arti penguasa Jawa sebagai titisan dewa menjadi khalifah Tuhan di muka bumi. Sebagaimana diketahui bahwa raja Jawa sebelum Islam mensakralkan dirinya sebagai penerus kejayaan Majapahit. Transisi kerajaan Mataram ke Islam tampak tidak mengubah tradisi yang ada. Raja-raja muslim Mataram masih melakukan ritual kerajaan yang sangat kental nuansa Hindu-Budha.

Menurut Vlekke, para raja Jawa memilih Islam bukan karena mereka menyukai agama itu, tetapi karena situasi politik mendorong melakukan konversi ke Islam. Pada abad ke 16 portugis mendarat di pantai Jawa. Para raja Jawa dihadapkan pada

<sup>3</sup> Ensiklopedia Pahlawan Indonesia dari Masa ke Masa (Yogyakarta: Grasindo, tt), hlm 26. Lihat juga Didi Junaidi. *Pahlawan-pahlawan Indonesia Sepanjang Masa* (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), 163

<sup>4</sup> Mark R Woodward. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 20

<sup>5</sup> [www.sejarahnusantara.com](http://www.sejarahnusantara.com)

<sup>6</sup> <http://www.kerajaanusantara.com/id/yogyakarta-hadiningrat/sejarah> diakses 14 September 2015

<sup>7</sup> Sabdacarata. *Sejarah Keraton Yogyakarta*, 7

<sup>8</sup> Purwadi. *Sejarah Raja-Raja Jawa: Sejarah kraton dan Perkembangannya di Jawa* (Yogyakarta: Media abadi, 2007), 385. Bandingkan gelar tersebut dengan <http://www.kerajaan-nusantara.com/id/yogyakarta-hadiningrat/sejarah>

pilihan yang sulit antara bersekutu dengan Portugis atau memilih bekerjasama dengan Johor dan Demak. Melihat kecurangan Portugis, maka raja Jawa lebih memilih dekat dengan Islam.<sup>9</sup>

Pada awalnya raja Mataram memakai gelar panembahan, sultan, dan sunan. Raja pertama yang menggunakan gelar sultan adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645).<sup>10</sup> Ia mengirim utusan ke Mekah untuk meminta gelar sultan pada 1641 untuk melegitimasi kekuasaannya. Konon ia terinspirasi oleh penguasa Banten, Pangeran Ratu yang sudah mendapatkan gelar sultan terlebih dahulu sehingga namanya berubah menjadi Sultan Abul Mafakir Mahmud Abdul Kadir.<sup>11</sup>

Dalam beberapa kronik sejarah menyebutkan bahwa kebijakan Sultan Agung tersebut dimotivasi oleh seringnya muncul perselisihan antara pemeluk agama Hindu dengan penganut agama Islam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Sultan juga menerima kedatangan para bupati sebagai bukti kesetiaan dan ketundukan mereka terhadap kekuasaan Sultan Mataram. Maka sebagai penguasa tertinggi, Sultan memiliki kewajiban sebagai penata agama maupun sebagai wakil Allah di muka bumi. Sehingga gelar yang melekat adalah *Sayidin Panotogomo Khalifatullah*.

Namun raja penggantinya yakni Amangkurat I sampai III menggunakan gelar Sunan. Sedangkan Amangkurat IV (1719-1724) menjadi yang pertama menggunakan gelar *Khalifatullah*. Setelah perjanjian Gianti pada 1755 yang memecah Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta gelar *Khalifatullah* melekat pada para sultan Yogyakarta sedangkan raja-raja Surakarta memakai gelar *Sunan*.<sup>12</sup> Oleh karena itu di dalam literature

<sup>9</sup> Bernard Hubertus Maria Vlekke. *Nusantara: Sejarah Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008), 19

<sup>10</sup> Nama aslinya Mas Rangsang. Ia adalah penguasa terbesar dari Kerajaan Mataram Islam. Selain banyak menaklukkan wilayah, ia juga memperkenalkan penggunaan kalender Jawayang murni dipengaruhi oleh kalender Islam. Sebelumnya kalender yang berlaku adalah kalender caka yang perhitungan tahunnya dimulai sejak lahirnya Aji Saka dan berdasarkan pada peredaran matahari. M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), 332-333

<sup>11</sup> Hendri F Isnaeni. Asal-usul Gelar Khalifatullah di Kesultanan Yogyakarta dalam *Historia.id*

<sup>12</sup> Hendri F Isnaeni. Asal-usul Gelar Khalifatullah di Kesultanan Yogyakarta dalam *Historia.id*

resmi sebutan untuk raja-raja Surakarta adalah *Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwono Senapati Ing Alaga Abdurahman Sayidin Panatagama*. Sementara sebutan untuk raja Kesultanan Yogyakarta adalah *Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Alaga Abdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah*.

Teuku Ibrahim Alfian menguraikan makna gelar itu. *Senapati* berarti sultanlah penguasa yang sah di dunia ini. *Ing Alogo* artinya raja mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian dan peperangan, atau sebagai panglima tertinggi saat perang. *Abdurahman Sayidin Panatagama* berarti sultan dianggap sebagai penata, pemuka, dan pelindung agama. Sementara *Khalifatullah* memiliki arti spiritual bahwa sultan sebagai wakil Allah di muka bumi ini.

Sultan HB X yang nama aslinya Herjuno Darpito dinobatkan sebagai raja di Kesultanan sejak 1989. Ia adalah seorang putera mahkota karena terlahir sebagai anak laki-laki tertua dari Sri Sultan HB IX. Penobatannya sebagai sultan berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga. Berdasarkan catatan sejarah, ternyata tidak semua Sultan Yogyakarta adalah putera mahkota. Dengan status keistimewaan Yogyakarta, Sultan HB X juga berperan sebagai gubernur di provinsi ini.

### Putri Mahkota Untuk Kesultanan Yogyakarta

Sultan Hamengku Buwono mengumumkan sabda Raja pada 30 April 2015 yang isinya antara lain: Pertama, mengubah gelar Khalifatullah pada namanya. Sehingga gelarnya berubah menjadi *Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senapati Ing Ngalaga Langgengin Bawono Langgeng Langgeng Tata Panatagama*. Gelar Sultan sebelumnya adalah *Ngarsa Dalem Sampeyan Salem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdulrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat*. Kedua, Mengubah perjanjian antara pendiri Mataram ki Ageng Giring dan ki Ageng Pamanahan. Ketiga, penyempurnaan keris ki Ageng Kopek dan ki Ageng Piturun.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> "Sultan Yogyakarta persiapkan Putri Mahkota" dalam *bbc.com* diakses 13 September 2015

Selang beberapa hari kemudian pada 5 Mei 2015, Sultan juga memberikan gelar baru kepada putri sulungnya GKR Pembayun menjadi GKR *Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram*.<sup>14</sup> Sabda Sultan ini lantas menimbulkan polemic tidak hanya di lingkungan istana, tetapi juga masyarakat luas karena merupakan pertama kalinya perempuan bangsawan mendapat gelar yang biasanya dianugerahkan kepada bangsawan laki-laki. Langkah yang diambil oleh Sultan ini dinilai sebagai manuver untuk mengubah pakem yang ada tentang pewaris tahta. Nama baru pada gelar Sultan sangat memungkinkan seorang perempuan menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta. Gelar *Khalifatullah* yang maknanya sebagai seorang pemimpin laki-laki telah ditanggalkan.

Keluarga Sultan, terutama adik-adiknya menilai bahwa langkah Sultan adalah keliru dan bertentangan dengan adat maupun aturan Keraton Yogyakarta. Untuk itu, beberapa orang adik Sultan berziarah ke makam leluhur memintakan maaf atas perilaku Sultan yang dinilai melanggar adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun tersebut. Sehingga ketika Sultan mengumumkan nama baru bagi putri sulungnya, tidak ada satupun kerabat Sultan HB X yang hadir. Barangkali sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Sultan. Pergantian nama ini jelas menunjukkan bahwa Pembayun yang akan menggantikan ayahnya menjadi sultan yang ke sebelas bertahta di Yogyakarta.<sup>15</sup>

Merespon langkah Sultan HB X, keluarga Sultan akan menggugat sabda raja tersebut jika nanti disahkan oleh kementerian dalam negeri. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Pangeran dalam sebuah wawancara dengan surat kabar nasional. Pangeran Haryo akan membawa ke pengadilan kasus ini jika nanti benar-benar disahkan.

Pro dan kontra terhadap sabda Sultan muncul juga dari luar keraton. Organisasi Islam di Yogyakarta, baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama ikut memprotes kebijakan Sultan. Heni Astiyanto, Ketua Muhammadiyah Kota Yogyakarta menganggap bahwa penghapusan gelar tersebut praktis mengubah pakem Kesultanan Yogyakarta yang selama ini beridentitas sebagai Kerajaan Mataram Islam.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> "Sabda Raja, Nama Baru Pembayun Mirip Gelar Raja" dalam [www.tempo.co](http://www.tempo.co) diakses 14 September 2015

<sup>16</sup> [www.tempo.co](http://www.tempo.co)

*Khalifatullah* memiliki arti sebagai pemimpin yang mengatur bumi, bukan pemimpin agama tertentu. Lebih lanjut ia juga mengungkapkan bahwa Muhammadiyah sangat menghargai nilai tradisi dalam keraton sehingga Sultan HB X jika ingin memunculkan paradigma baru tidak menabrak tradisi dan pakem yang sudah dijaga bersama selama ini. "Kami tidak setuju raja perempuan, bukan soal kesetaraan namun pakem adatnya", ujarnya dalam wawancara dengan koran Tempo.<sup>17</sup>

Protes yang sama pun dikatakan oleh Wakil Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Jadul Maulana. Ia mengatakan bahwa penghilangan gelar *Khalifatullah* akan menyebabkan Keraton mengalami disorientasi. Menurut dia *Khalifatullah* menjadi satu bagian utuh ajaran Al-Quran. "Bukan untuk tujuan diskriminatif, tapi membimbing pemimpin agar bisa menjalankan perilaku sesuai ajaran Allah. Ini sifatnya universal", ujarnya.<sup>18</sup>

Keberatan juga muncul dari masyarakat yaitu Sukiman Hadiwijoyo, ketua Asosiasi Pamong desa Semar Sembogo. Ia mengkhawatirkan jika pergantian nama Sultan HB X akan melanggar Undang-undang No 13/2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Dicantumkan dalam undang-undang itu bahwa siapapun sultan yang bertahta itu pasti menjabat sebagai gubernur. Jika terjadi pergantian nama sultan, maka sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang keistimewaan Yogyakarta.<sup>19</sup>

### Pandangan Islam Terhadap Pemimpin Perempuan

Jika merujuk kepada Islam, terdapat dua aliran pemikiran tentang kepemimpinan perempuan. Pendapat pertama adalah kelompok yang melarang kepemimpinan perempuan dan kelompok kedua adalah mereka yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Berikut ini dalil Quran dan hadis yang sering dijadikan sebagai dalil oleh kedua kelompok tersebut:

#### 1. QS An-Nisa 34

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com)

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dan dengan sebab apa-apa yang mereka infaqkan dari harta-harta mereka. Maka wanita-wanita yang shalihah adalah yang qanitah (ahli ibadah), yang menjaga (kehormatannya) taatkala suami tidak ada dengan sebab Allah telah menjaganya. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan ketidaktaatannya maka nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka sudah mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan (untuk menyakiti) mereka, sesungguhnya Allah itu Mahatinggi Mahabesar”.

Kenapa Allah mengangkat derajat laki-laki atas perempuan? Apa ada diskriminasi? Tidak sama sekali. Laki-laki dikatakan sebagai *qawwam*, yang merupakan shighah mubalaghah, diambil dari kata qiyam. Kata ini berarti berdiri atas sesuatu dan menjaganya. Jadi laki-laki mempunyai kelebihan dengan tanggungjawab untuk menjaga, menafkahi, mendidik dan memelihara istri-istrinya. Hal ini dengan sebab sesuatu yang telah Allah utamakan satu di antara yang lain.

- Adapun dalil kedua adalah QS An-Nahl pada ayat berikut ini:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka...” (QS. An-Nahl: 43).

- QS Al-Ahzab 33: “dan hendaklah kamu perempuan tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu.
- QS Al-Baqarah 282: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.
- Sementara dari Hadis, larangan kepemimpinan politik perempuan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah berikut ini:<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-Tirmizi, al-Nasai, dan Ahmad bin Hambal dengan redaksi yang berbeda. Lihat Sahih Bukhari jilid III, juz V hlm 136. Kitab al Maghazi bab *kitab an-Nabi ila Kisra wa Qaisar*. Musnad Ahmad Jilid V. 38, 43, dan 47.

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكره قال: 'لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة

“...Ketika sampai kepada Nabi berita tentang bangsa Persia yang mengangkat anak perempuan Kisra sebagai Ratu mereka, Nabi bersabda: “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”

Letak kata kunci dari matan hadis tersebut adalah kalimat dimana “lan” memiliki fungsi sebagai huruf *nafi lil-istiqlal*, yang menafikan kemungkinan yang akan terjadi. Sementara “*yuflih*” yang berasal dari *fi’il madhi* “*aflaha*” dalam kamus al-munawwir memiliki arti berhasil baik (sukses; *najah*) terdiri dari *fi’il mudhari’* memberikan pemaknaan akan sebuah kesuksesan pada waktu itu dan atau di masa mendatang. Kemudian kalimat “*wallau*” yang memiliki arti menguasai atau mempercayakan.

Jumhur ulama memahami dalil dan hadis kepemimpinan politik perempuan ini secara tekstual. Mereka menganggap bahwa berdasarkan petunjuk dalil-dalil tersebut pengangkatan perempuan dalam jabatan kepala negara, hakim pengadilan, dan jabatan politis lainnya dilarang dalam agama. Mereka menyatakan bahwa perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk mengelola harta suaminya. Oleh karenanya beberapa ulama seperti al Khattabi mengatakan bahwa seorang perempuan dilarang menjadi khalifah. Selain al Khattabi, nama lainnya adalah Lutfi Syaikani yang menafsirkan hadis tersebut bahwa perempuan tidak ahli dalam hal kepemimpinan sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.<sup>21</sup>

Sementara para ulama lainnya yakni Ibnu Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif dan Kamal ibn Abi Hamman juga mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara. Begitu pula Sayid Sabiq berpendapat bahwa kesepakatan fuqaha mengenai syarat laki-laki bagi kepala negara sebagaimana syarat bagi seorang qadi

<sup>21</sup> Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaikani. *Nail al-Authar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Harabi,tt), 298.

disandarkan pada hadis tersebut.<sup>22</sup> Selain para ulama fiqh, ulama tafsir seperti Ibnu Kasir dan ar-Razi sependapat dalam menafsirkan QS An-Nisa 34 bahwa laki-laki memiliki keutamaan atas wanita timbul dari banyak sisi.

Adapun kelompok yang membolehkan kepemimpinan perempuan menukil dalil sebagaimana di bawah ini:

1. QS An-Naml 27: 23-44 yang mengisahkan dan memuji tentang Ratu Balqis
2. Hadis Nabi yang artinya “Allah mengizinkan kalian perempuan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhanmu
3. Kisah sejarah tentang kepemimpinan Aisyah dalam perang Jamal
4. Hadis Nabi “Wanita adalah saudara dari laki-laki
5. Hadis nabi: “Setiap Kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban”<sup>23</sup>

Ulama kontemporer yang memperbolehkan kepemimpinan perempuan adalah Muhammad Sayid Thantawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir. Menurut mereka kepemimpinan perempuan dalam jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah baik dalam *wilayahul uzma* maupun posisi di bawahnya. Pendapat Sayid Thantawi disetujui juga oleh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa perempuan boleh menduduki jabatan kepala negara (*ri'asah daulah*), mufti, anggota parlemen, atau posisi apapun karena wanita itu memiliki kemampuan sempurna (*tamam al-ahliyah*). Ditegaskan oleh Qardhawi tidak ada satu pun nash Quran dan hadis yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan.<sup>24</sup>

## Simpulan

**Sabda raja Sultan Hamengku Buwono yang mengganti gelarnya mendapat respon negative dari**

<sup>22</sup> NA Abaz dan A Maftuh Abegebriel. “Fundamentalisme Hadis” dalam A Maftuh Abegebriel dan A Yani Abeveiro. *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia* (Yogyakarta: SR Ins, 2004), 205 dan Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah* (Semarang: Toha Putra, tt), 315.

<sup>23</sup> Zaitunah Subhan. *Perempuan dan Politik dalam Islam*. (Yogyakarta: LKiS, 2004), 6.

<sup>24</sup> A. Fatih Syuhud. “Pemimpin Wanita dalam Islam” dalam [www.fatihsyuhud.net](http://www.fatihsyuhud.net)

berbagai kalangan. Apalagi gelar yang dihapus dari namanya adalah *Khalifatullah* yang maknanya kepemimpinan yang memiliki dimensi agama dan sangat sakral bahwa sultan adalah seorang pemimpin laki-laki sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Pertentangan terhadap gagasan Sultan HB X semakin luas ketika ia memberikan gelar baru kepada putri sulungnya GKR Mangkubumi. Perubahan nama sultan dan pemberian gelar baru bagi Pembayun lantas memperkuat dugaan jika Sultan HB X menginginkan agar putrinya dipersiapkan sebagai pewaris tahta. Hal ini dianggap menentang tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun. Apalagi gelar khalifatullah merujuk kepada seorang laki-laki. Ketika sultan dijabat oleh seorang perempuan, maka dinilai Mataram Islam akan terputus.

Jika dilihat dari perspektif Islam, maka ulama terbagi menjadi dua pendapat tentang kebolehan dan larangan perempuan menduduki jabatan penting dalam politik. Ulama klasik umumnya melarang kepemimpinan perempuan. Kelompok ini diwakili oleh ulama tafsir yakni Ibnu Kasir dan Ar-Razi. Sedangkan ulama fiqh yakni Ibnu Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif dan Kamal ibn Abi Hamman. Sedangkan ulama kontemporer seperti Sayid Thantawi dan Yusuf Qardhawi memiliki pendapat tentang bolehnya perempuan menjabat di ruang public.

Maka dapat disimpulkan bahwa para penentang terhadap sabda raja Yogyakarta jika ditinjau dari perspektif Islam adalah penganut ulama klasik, di mana mereka memiliki keyakinan bahwa pengganti Sultan HB X bukanlah anak perempuannya tetapi saudara laki-laki Sultan yang artinya paman GKR Pembayun. Namun perlu dicermati bahwa konflik internal keraton sesungguhnya adalah perang memperebutkan tahta raja karena sejarah Mataram sejak awal diwarnai konflik politik. Sehingga mungkin saja jika putri mahkota tidak akan menjadi *Sultan Kaping Sewelas* walau sekarang adalah zaman kesetaraan gender. (wallahu a'lam)

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Fatih Syuhud. "Pemimpin Wanita dalam Islam" dalam [www.fatihsyuhud.net](http://www.fatihsyuhud.net)
- Amelia Fauzia. *Tentang perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Bernard Hubertus Maria Vlekke. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Didi Junaidi. *Pahlawan-pahlawan Indonesia Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.
- Hendri F Isnaeni. "Asalusul Gelar Khalifatullah di Kesultanan Yogyakarta" dalam [Historia.id](http://www.kerajaanusantara.com/id/yogyakarta-hadiningrat/sejarah)  
<http://www.kerajaanusantara.com/id/yogyakarta-hadiningrat/sejarah>  
<http://www.sejarahnusantara.com>  
<http://www.tempo.co>
- M.Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara, 2012.
- Mark R Woodward. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan* (Yogyakarta: LKiS, 1999
- MC Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Terj.A History of Modern Indonesia since 1200. Jakarta: Serambi, 2008.
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Harabi, tt.
- NA Abaz dan A Maftuh Abegebriel."Fundamentalisme Hadis" dalam A Maftuh Abegebriel dan A Yani Abeveiro. *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*. Yogyakarta: SR Ins, 2004.
- Purwadi. *Babad Ganti: Sejarah Pembagian Kerajaan Jawa*. Yogyakarta: Media Abadi, 2008.
- Purwadi. *Sejarah Raja-Raja Jawa: Sejarah kraton dan Perkembangannya di Jawa*. Yogyakarta: Media abadi, 2007
- Sabdacarakatama. *Sejarah Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Narasi, 2009.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Semarang: Toha Putra, tt.
- Siti Maryam, dkk. *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: SPI Fakultas adab&LESFI, 2002
- Sultan Yogyakarta persiapkan Putri Mahkota" dalam [bbc.com](http://bbc.com)
- Zaitunah Subhan. *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

